



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS  
MELAYANI (WBBM)  
2022**

**PENATAAN  
SISTEM  
MANAJEMEN  
SDM**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**DALAM MELAKUKAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI,  
TELAH DILAKUKAN MUTASI PEGAWAI ANTAR JABATAN**

## Daftar Isi

1. Laporan Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri - Kebutuhan Pegawai.
2. Penyampaian Konsep SK Pemindahan Pegawai.
3. SK PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. RIZKY KURNIA CHAESARIO.
4. Penyampaian SK Pemindahan A.n Lambang dan Annisa.
5. SK PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n Lambang dan Annisa.

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS  
NOMOR: 892/2300/HP.00/12/2021**

Kepada : Yth. Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol  
Perihal : Laporan Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri  
Tanggal : 31 Desember 2021

---

Dengan hormat, berkenaan dengan pemenuhan kinerja dan capaian Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2021, berikut kami sampaikan empat (4) laporan (**terlampir**) dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Semester II: Analisa, Evaluasi dan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri
2. Laporan pengelolaan dan pengembangan internasionalisasi website MK tahun 2021
3. Laporan Semester II: Penerjemahan Informasi Konstitusi
4. Laporan Triwulan IV: Pengelolaan Kunjungan Kerja Luar Negeri, Kegiatan Internasional, Dan Aktivitas Pendukung

Adapun secara umum, memasuki tahun kedua pandemi (2021), kegiatan kerjasama luar negeri MKRI telah jauh lebih aktif dibanding pada tahun 2020. Dimana secara ringkas, dapat kami sampaikan beberapa poin utama sebagai berikut:

**Sisi Administratif**

- Pengelolaan anggaran Kerjasama Luar Negeri telah dilakukan secara cermat dan efisien dengan realisasi penyerapan sebesar 99,97 %, setara dengan Rp 7.728.440.088,-
- Sepanjang semester II 2021 (Juli – Desember 2021), tim kerjasama luar negeri telah melakukan 24 kali pertemuan internal, 17 kali pertemuan koordinasi dengan mitra kerja / stake holders, mengikuti 3 konferensi berskala internasional dan kunjungan kerja ke 6 negara sahabat (*data lengkap terdapat pada laporan Analisa, Evaluasi dan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri terlampir*).

**Penyelenggaraan Konferensi J-OIC**

- Pada September 2021, kesuksesan dalam penyelenggaraan konferensi JOIC tahun 2021 yang dilakukan secara *hybrid* (online dan onsite) merupakan modal yang kuat untuk persiapan penyelenggaraan kongres WCCJ pada tahun 2022.
- Konferensi JOIC yang menghasilkan Deklarasi Bandung menjadi tonggak berdirinya asosiasi peradilan konstitusi untu negara-negara anggota OKI (The Conference of Constitutional Jurisdiction of OIC Member / Observer State. CCJ – OIC). Kesuksesan ini merupakan pola yang baik, sebagaimana pola MKRI saat sukses mendirikan AACC melalui Deklarasi Jakarta tahun 2010.

**Kunjungan Kerja Luar Negeri**

- Pada tahun 2021, delegasi MKRI telah melakukan serangkaian kunjungan kerja 6 (enam) negara sahabat, yaitu: MK Spanyol, MK Portugal, MK Yordania, MK Turki, MK Uzbekistan dan MK Korea.



- Terkhusus kunjungan kerja Ketua MKRI ke Spanyol, adalah penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama pertama yang dilakukan pasca pandemi covid 2019. Kerjasama antara MKRI dan MK Spanyol, kiranya dapat segera diimplementasikan pada tahun 2022, diantaranya melalui program pelatihan / peningkatan kapasitas pegawai.
- Terkait kunjungan kerja ke MK Turki yang secara khusus membahas konsep statuta CCJ - OIC, MKRI dengan MK Turki telah sepakat bahwa CCJ – OIC harus bersifat independen dan mandiri, terkhusus kaitannya dengan hubungan terhadap *Organization of Islamic Cooperation*. Adapun terkait Sekretariat dan *Headquarter* Asosiasi akan dibahas lebih detail pada kesempatan yang berikutnya.

### **Pengelolaan EN.MKRI.ID dan Penerjemahan Informasi Konstitusi**

- Website EN.MKRI.ID telah terupdate secara berkala dan dikunjungi oleh 16.443 pengunjung dalam tahun 2021. Jumlah pengunjung laman meningkat jauh dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 529 pengunjung. (*Data lengkap pada Laporan pengelolaan dan pengembangan internasionalisasi website*)
- Dari data statistik, 40% pengunjung situs menggunakan *mobile* (telepon genggam), oleh karenanya tampilan en.mkri.id versi *mobile* perlu untuk mendapat perhatian lebih khusus.
- Terkait penerjemahan, seluruh berita (sidang dan non sidang) pada tahun 2021 sejumlah 1.006 berita (meningkat 42,9% dari berita tahun 2020) telah diterjemahkan. Demikian pula terhadap 82 putusan / ikhtisar putusan, 11 edisi majalah konstitusi, laporan tahunan 2020 dan sejumlah artikel lainnya telah diterjemahkan kedalam bahasa inggris.

### **Persiapan Kongres WCCJ**

- Terkait dengan persiapan WCCJ, pada tahun 2021 MKRI telah melakukan serangkaian persiapan termasuk diantaranya adalah: Pelaporan progres persiapan kepada Biro WCCJ, Penyiapan Anggaran Kongres, Peninjauan Lokasi, serta koordinasi dengan para mitra kerja (Kemlu, Setneg, BNPB).
- Persiapan yang lebih matang perlu segera dieksekusi pada awal tahun 2022, diantara terkait penambahan anggaran kongres; Kerjasama dan Komunikasi MKRI dengan panitia G-20, serta pengadaan jasa PCO yang perlu bersinergi dengan PCO G.20.

### **Lain-lain**

- Pada tahun 2021, Sub bagian kerjasama luar negeri terdiri satu (1) orang PNS aktif dan satu (1) orang PPNPN Penerjemah, dimana satu (1) PNS lainnya sedang tugas belajar. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kongres WCCJ tahun 2022, tim internasional MKRI perlu untuk diperkuat dengan penambahan beberapa (2 / 3 orang) PNS aktif dan 1 orang PPNPN penerjemah bahasa inggris.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,  
**Heru Setiawan**



Digital Signature  
mk-707822499211230050228

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS**

-----

**Nomor 5/2200/KP.04.00/01/2022**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Perihal : Penyampaian Konsep Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah  
Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Sdr. Rizky Kurnia Chaesario  
Tanggal : 03 Januari 2022

---

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan konsep Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Rizky Kurnia Chaesario, S.IP., M.Sc. di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Apabila Bapak Sekjen tidak berpendapat lain, kami mohon agar dapat menandatangani Keputusan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak Sekjen kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya  
Manusia dan Organisasi,  
**Teguh Wahyudi**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2022

### TENTANG

### PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. RIZKY KURNIA CHAESARIO, S.IP., M.Sc. DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Rizky Kurnia Chaesario, S.IP., M.Sc. di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. RIZKY KURNIA CHAESARIO, S.IP., M.Sc. DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan penugasan pegawai pada jabatan dan kelas jabatan kepada:

Nama	:	Rizky Kurnia Chaesario, S.IP., M.Sc.
NIP	:	19910728 201402 2 003
Pangkat/Golongan Ruang	:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	Lama	: Analis Pengembangan SDM Aparatur
	Baru	: Analis Informasi Perencanaan Kerjasama Luar Negeri
Kelas Jabatan	:	7
Terhitung Mulai Tanggal	:	3 Januari 2022

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,  
**M. GUNTUR HAMZAH**



**NOTA DINAS**

-----

**Nomor 532/2200/KP.04.00/06/2021**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Perihal : Penyampaian Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
tentang Pemindahan Pegawai di Biro Hubungan Masyarakat dan  
Protokol  
Tanggal : 22 Juni 2021

Sehubungan dengan arahan Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi pada Nota Dinas Kepala Biro Humas dan Protokol Nomor 330/2300/KP.04.00/06/2021, 18 Juni 2021, perihal Usulan Penataan Pegawai di Lingkungan Biro Humas dan Protokol, dengan hormat kami sampaikan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN LAMA</b>	<b>JABATAN BARU</b>
1	Lambang Tri Sulistyo	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama pada Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga
2	Annisa Lestari	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Analisis Tata Usaha pada Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga

Apabila Bapak Sekjen tidak berpendapat lain, kami mohon agar dapat menandatangani Keputusan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak Sekjen kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya  
Manusia dan Organisasi,  
**Teguh Wahyudi**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 182 TAHUN 2021

TENTANG

### PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan :

Nota Dinas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Nomor 330/2300/KP.04.00/06/2021, tanggal 18 Juni 2021, perihal Usulan Penataan Pegawai di Lingkungan Biro Humas dan Protokol.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang namanya sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua), diangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam), terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum pada lajur 9 (sembilan), pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2021  
SEKRETARIS JENDERAL,  
**M. GUNTUR HAMZAH**



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal  
 Mahkamah Konstitusi  
 NOMOR 182 TAHUN 2021  
 Tanggal : 22 Juni 2021

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL . RUANG	JABATAN		KELAS JABATAN		TMT
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lambang Tri Sulistiyo, A.Md.	19770901 200604 1 001	Penata MudaTk. I (III/b)	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama pada Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	7	7	1 Juli 2021
2	Annisa Lestari, S.I.Kom., M.Si.	19851216 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat	Analisis Tata Usaha pada Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	7	7	1 Juli 2021

Dikeluarkan di Jakarta  
 pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS JENDERAL,  
**M. GUNTUR HAMZAH**

